

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

World Health Organization (WHO) menyebutkan gizi dan nutrisi memiliki peran yang baik untuk kesehatan tubuh. Pemenuhan nutrisi dan gizi penting sebagai asupan yang diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia, namun pemenuhan gizi akan lebih kompleks dibanding dengan nutrisi yang dikaitkan dengan kalori pada asupan makanan. Kesehatan tidak hanya untuk meningkatkan harapan hidup tetapi juga meningkatkan kualitas hidup.

Permasalahan gizi dalam kesehatan masyarakat menjadi tantangan utama pembangunan suatu bangsa untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Kemiskinan dan kekurangan gizi merupakan suatu fenomena yang saling terkait, sehingga meningkatkan status gizi menjadi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seluruh kelompok usia dapat mengalami permasalahan gizi, namun pada suatu kelompok umur tertentu dapat memengaruhi status gizi pada periode siklus kehidupan berikutnya, misalnya pada wanita produktif dalam reproduksi atau wanita yang telah menikah (Maflahah, 2019). Masa kehamilan merupakan periode penting karena menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Tumbuh kembang anak sangat ditentukan oleh kondisi ibu saat janin berada dalam kandungan (Ekayanthi dan Suryani, 2019).

Berdasarkan laporan *Levels and Trends in Child Malnutrition* oleh UNICEF, WHO, dan *World Bank Group* (2021), menyoroti tren banyaknya kondisi malnutrisi anak sesuai temuan lapangan yang dibagi menjadi 3, yakni *stunting*, *wasting*, dan

overweight. *Joint Child Malnutrition Estimates* sesuai UNICEF, WHO, dan *World Bank Group* (2021) mendeskripsikan nutrisi yang baik membuat anak-anak berada di jalur untuk bertahan hidup dan berkembang. Data malnutrisi anak sesuai *Joint Child Malnutrition Estimates Key findings of the 2021 edition* menyebutkan bahwa diperkirakan 5,7 persen atau 38,9 juta anak di bawah 5 tahun di seluruh dunia terkena *overweight* pada tahun 2020; lalu *wasting* berada di tingkat 6,7 persen atau 45,4 juta anak di bawah 5 tahun secara global pada tahun 2020; kemudian yang memiliki jumlah terbanyak pada penderita *stunting*, yakni memengaruhi sekitar 22,0 persen atau 149,2 juta anak di bawah 5 tahun secara global pada tahun 2020. Diperoleh angka terbanyak malnutrisi anak terdapat di Asia.

Menurut Mauludiyah, dkk (2020), *Stunting* adalah salah satu narasi status kekurangan gizi kronis pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak sejak awal kehidupan. *Stunting* merupakan kondisi kekurangan gizi kronis terhitung dari usia seribu hari pertama kehidupan anak, yakni sejak masa kehamilan hingga berusia dua tahun. Kekurangan gizi ditinjau dari kurangnya kualitas, volume, hingga variasi asupan makanan yang dikonsumsi oleh ibu selama masa kehamilan. Faktor lain yang menunjang adalah pola asuh, tingkat kesehatan anak, kondisi sosio-ekonomi dan kondisi lingkungan hidup. Dalam Aprianingsih (2012) diambil keterangan bahwa indikator *stunting* adalah postur tubuh yang pendek akibat dari kurangnya asupan makanan dalam waktu lama, peningkatan morbiditas dan kualitas makanan yang buruk. Permasalahan yang ditimbulkan oleh *stunting* pada pertumbuhan dan perkembangan anak menurut Alderman, dkk (2006) dan Boissiere, dkk (1985) mengakibatkan ketidakefektifan produktivitas ketika dewasa karena kemampuan kognitif pada masa

awal pertumbuhan yang rendah sehingga berpengaruh pada pendapatan. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, *stunting* merupakan bentuk gangguan pertumbuhan kronis pada anak yang berpengaruh pada karakteristik pendeknya tubuh akibat kekurangan nutrisi sejak awal kehamilan.

Pengentasan *stunting* menjadi topik hangat di dunia sejak tahun 2012, WHO mengadopsi resolusi tentang nutrisi ibu, bayi, dan anak kecil untuk mengurangi jumlah balita pendek dengan Rencana Implementasi Komprehensif berjangka panjang yang diharapkan dapat memperbaiki gizi anak untuk pengurangan sejumlah 40% balita pendek. Perkembangan Rencana Implementasi Komprehensif (2012–2025) adalah hadirnya seruan SDGs pada tahun 2015, yakni program pembaharuan yang dihadirkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai wadah untuk menampung perbaikan kondisi dunia dalam mengupayakan pergerakan kegiatan untuk memajukan peradaban secara global yang lebih baik sehingga Rencana Implementasi Komprehensif (2012–2025) menjadi bagian dari program turunan pembangunan visi dan misi SDGs. *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan sebuah program berisi beberapa strategi visioner pembangunan global oleh PBB pada tahun 2015 sebagai seruan universal untuk bertindak untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan bahwa semua orang akan menikmati perdamaian dan kemakmuran.

Pada 2015, *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Global secara resmi disahkan sebagai kesepakatan pembangunan global. SDGs dirancang untuk mengakhiri beberapa permasalahan di lingkup dunia yang terangkum dalam 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju dan

negara berkembang. Beberapa negara telah berkomitmen untuk memprioritaskan kemajuan bagi mereka yang tertinggal, sekurang-kurangnya 193 kepala negara hadir, termasuk Indonesia.



Gambar 1.1. 17 Sustainable Development Goals

Sumber : www.huffingtonpost.com

Sejumlah 17 target yang terkandung dalam SDGs adalah gambaran umum dari beberapa target khusus bersama dengan indikatornya. Pengentasan permasalahan *stunting* berada pada target nomor 2 SDGs yang berjudul “Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik serta mempromosikan pertanian berkelanjutan” atau disebut dengan SDGs *Zero Hunger*. Terdapat poin *Zero Hunger* (2015-2030) yang menjadi landasan untuk mengurangi tingkat *stunting*, yaitu

Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai, pada tahun 2025, target yang disepakati secara internasional untuk *stunting* dan *wasting* pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja putri, ibu hamil dan menyusui serta manula (Poin 2 *Zero Hunger* 2015-2030)

Penerapan SDGs *Zero Hunger* (2015-2030) dilatarbelakangi oleh lemahnya ketahanan pangan di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan sekitar 1 dari 10 orang di seluruh dunia menderita kelaparan. Hampir 1 dari 3 orang kekurangan akses rutin ke

makanan yang memadai akibat dari melonjaknya harga pangan pada 47% negara pada tahun 2020. Dampak terhadap generasi selanjutnya adalah anak-anak yang termasuk dalam kategori *stunting*.

Di Indonesia, kondisi *stunting* merupakan permasalahan gizi utama. Data prevalensi balita *stunting* menunjukkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia menempati urutan keempat pada kasus *stunting* di dunia dengan angka mencapai 27,67% (Kompas.com, 2021). Perbedaan data tercatat pada situs *Goalkeepers by gatesfoundation.org* yang mencatat bahwa tingkat *stunting* Indonesia pada tahun 2019 mencapai 32%. Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Rapat Kerja Nasional BKKBN, dimana prevalensi *stunting* di Indonesia turun di tahun 2022 berjumlah 21,6%, diikuti pernyataan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) yang menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 115 dari 151 negara dengan angka prevalensi *stunting* tertinggi secara global. Selaras dengan adanya penelitian mengenai nilai rata-rata IQ masyarakat Indonesia berada di ranking 130 dari total 199 negara yang diuji, dilansir dari *World Population Review (2022)* yang menyebutkan bahwa IQ masyarakat Indonesia memiliki rata-rata 78,49 yang dinilai cukup rendah, serta menempati urutan ke-10 dari 11 negara kawasan Asia Tenggara.

Kementerian Kesehatan RI dalam laman resmi kemenkes.go.id menyebutkan bahwa pada tahun 2022, prevalensi *stunting* Indonesia berada di angka 21,6% meninjau laman kemensos.go.id mengutip maksud standar WHO berupa batas toleransi maksimal untuk *stunting* adalah 20% atau seperlima dari total jumlah anak balita. Program penanganan *stunting* yang sedang berjalan adalah pemerintah Indonesia menetapkan

target prevalensi *stunting* pada balita sejumlah 14% pada tahun 2024, yakni Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan Penanganan *stunting* di Indonesia telah masuk dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Penurunan tingkat *stunting* yang progresif hingga mencapai angka 21,6% pada tahun 2022 menurut data SSGI masih belum merata, bahkan pada tingkat provinsi. Kemajuan progress menuju 14% pada tahun 2024 dirasa akan sulit apabila masih terdapat kesenjangan dalam prevalensi *stunting* dari berbagai daerah.



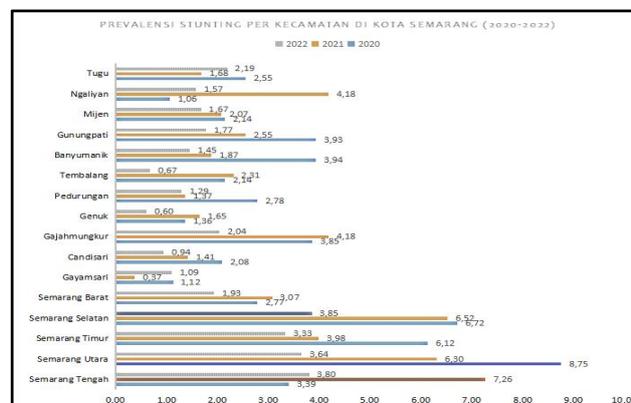
Gambar 1.2 Prevalensi *Stunting* di Jawa Tengah (2020-2022)

Sumber : Databoks Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), diolah

Berdasarkan Databoks SSGI Jawa Tengah, diinterpretasikan terjadi penurunan prevalensi *stunting* di Jawa Tengah setiap tahunnya, namun pada tahun 2021 menuju 2022 hanya terjadi penurunan yang sangat kecil sebesar 0,1% mengingat Indonesia harus terjadi penurunan sebesar 14% pada tahun 2024, sehingga harus diperhatikan untuk faktor-faktor yang berkaitan dengan naik atau turunnya tingkat *stunting*.

Pengentasan *stunting* dimulai dengan lingkup yang wilayah yang kecil memerlukan data konkret berupa kuantitas asli *stunting* yang tidak hanya berdasarkan prevalensi atau persentase jumlah balita dengan jumlah balita yang mengalami *stunting*. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengukur upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan *stunting* berdasarkan jumlahnya. Pengukuran berdasarkan jumlahnya dapat mempengaruhi baik atau buruknya suatu kondisi, namun pemusatan upaya perbaikan yang dapat dilakukan harus sesuai dengan kondisi kuantitas populasi yang lebih besar atau jumlah sangat memengaruhi perbedaan upaya perbaikan tersebut karena suatu item yang diukur tidak dapat dipukul rata. Berikut adalah data prevalensi *stunting* per kecamatan di Kota Semarang selama 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2020-2022:

Regulasi terbaru Kota Semarang pada tahun 2023, yakni Peraturan Walikota No. 45 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Percepatan Penurunan *Stunting* mengidentifikasi salah satu permasalahan *stunting* yang harus diperhatikan yaitu kedatangan balita ke posyandu untuk mengalami penimbangan dan pengukuran masih sebesar 44% setiap bulannya di Kota Semarang, sehingga menyebabkan masih ada balita yang tidak dipantau tumbuh kembangnya secara rutin.



Gambar 1.3 Prevalensi *Stunting* Per Kecamatan di Kota Semarang (2020-2022)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023, diolah

Interpretasi data Dinkes Kota Semarang (2023) diatas menjelaskan bahwa prevalensi per kecamatan di Kota Semarang selama 3 tahun (2020-2022) selalu menunjukkan peringkat prevalensi tertinggi yang berbeda. Pada tahun 2020, kecamatan Semarang Utara dengan prevalensi 8,75%; pada tahun 2021, kecamatan Semarang Tengah dengan prevalensi 7,26%; dan pada tahun 2022, kecamatan Semarang Selatan dengan prevalensi 3,85%. Berdasarkan tingkat prevalensi dikatakan aman karena dalam setiap tahunnya terjadi perbedaan interval kasus tertingginya sehingga tidak dapat menjadi suatu permasalahan. Perbedaan penafsiran menurut kasus atau jumlah *stunting* per kecamatan di Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Kasus *Stunting* Per Kecamatan di Kota Semarang Kurun Waktu 3 Tahun
(2020-2022)**

Kecamatan	2020		2021		2022	
	Stunting	Jumlah Balita	Stunting	Jumlah Balita	Stunting	Jumlah Balita
Semarang Tengah	87	2564	118	1625	73	1923
Semarang Utara	633	7232	255	4048	206	5654
Semarang Timur	217	3545	100	2510	93	2793
Semarang Selatan	183	2725	130	1994	93	2416
Semarang Barat	216	7793	128	4169	131	6784
Gayamsari	43	3836	7	1885	39	3569
Candisari	95	4561	33	2333	34	3623
Gajahmungkur	89	2310	58	1388	41	2014
Genuk	120	8819	59	3583	50	8327
Pedurungan	314	11296	43	3148	112	8692
Tembalang	280	13090	66	2860	73	10911
Banyumanik	330	8384	90	4814	101	6954
Gunungpati	250	6356	69	2701	111	6288
Mijen	120	5620	61	2952	84	5025
Ngaliyan	106	9962	137	3274	132	8391
Tugu	60	2353	13	774	43	1967
Total	3143		1367		1416	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023, diolah

Interpretasi data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Semarang (2023) menyebutkan bahwa permasalahan muncul karena adanya kesenjangan, yakni tingginya jumlah balita stunting selama 3 tahun berturut-turut di Kecamatan Semarang Utara. Angka kelahiran tertinggi pada tahun 2020 berada di Kecamatan Tembalang sejumlah 13.090; tahun 2021 berada di Kecamatan Semarang Barat sejumlah 4.169; kemudian tahun 2022 berada di Kecamatan Tembalang sejumlah 10.911.

Dilansir dari Suara Merdeka per 2023 menyebutkan bahwa jumlah *stunting* di Kota Semarang pada akhir tahun 2022 telah mencapai 1.410 kasus dari angka sebelumnya yang berjumlah 1.687 kasus. Meskipun begitu terdapat permasalahan bahwa penurunan jumlah *stunting* tidak signifikan, yakni selalu muncul kasus balita *stunting* yang baru. Permasalahan kompleks terdapat pada daerah Semarang Utara sehingga sering mengalami kasus *stunting* terbanyak. Terdapat gap kesenjangan yang dapat dikerucutkan kembali mengenai permasalahan balita *stunting* yang terdapat di Kecamatan Utara berdasarkan dengan kuantitas *stunting* per kelurahannya sebagai berikut :



Gambar 1.4 Kasus *Stunting* Tingkat Kelurahan di Kecamatan Semarang Utara (2020-2022)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang (2023), diolah

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang (2023), jumlah *stunting* per kelurahan yang terdapat di Semarang Utara selama 3 tahun terakhir (2020-2022), jumlah *stunting* pada kelurahan Tanjung Mas masih lebih tinggi dibanding dengan kelurahan lainnya, meskipun telah terdapat penurunan.

Berpedoman pada Perwali No. 45 tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang, terdapat implementasi program dalam penanganan *Stunting*, yakni program Si Bening (Semua Ikut Bergerak Bersama Menangani *Stunting*); program Dapur Dashat (Dapur Sehat Atasi *Stunting*) di 16 kecamatan Kota Semarang; Rumah Gizi; dan Rumah Penanganan *Stunting* Lintas Sektor bagi Baduta (Rumah Pelita) yang merupakan terobosan penanganan *stunting*, seperti pemberian pola asuh, penanganan gizi dan lain-lain. Seluruh upaya tersebut masuk kedalam Kolaborasi Penanganan *Stunting* Lintas Sektor pada tahun 2022. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan Kota Semarang kedepannya menjadi *zero stunting*. Penurunan *stunting* yang komprehensif dapat terjadi apabila terdapat penanganan kolaborasi yang terintegrasi dari pihak-pihak yang bersangkutan, yakni tanggung jawab para pemangku kepentingan.

Berdasarkan temuan lapangan Kelurahan Tanjung Mas telah diberikan upaya kolaborasi secara eksklusif penanganan *stunting* akibat banyaknya kasus *stunting* dan dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan pada kolaborasi penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Program pelaksanaan penanganan permasalahan gizi anak dan pola asuh yang belum optimal. Berdasarkan temuan wawancara pada Lurah Tanjung Mas (2022) dan Kepala Sekbid Kesehatan Masyarakat Dinas Kota Semarang (2023)

menuturkan bahwa salah satu kendala dalam kolaborasi, yakni pemberian PMT (Program Makanan Tambahan), program Dapur Sehat, dan kendala teknis untuk pendampingan dari TPK (Tim Pendamping Keluarga) di Kelurahan Tanjung Mas belum optimal yang disebabkan oleh keterbatasan dana dari pemerintah dan belum optimalnya pelaksanaan pemberian bantuan non-pemerintah (Sumber : wawancara kepada kepala kelurahan (2022) dan wawancara kepada Kepala Sekbid Kesehatan Masyarakat Kota Semarang (2023)).

- 2) Koordinasi dari berbagai pihak seperti pihak swasta, media, akademisi, stakeholder dengan partisipasi masyarakat yang kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya edukasi dan kesadaran akan bahaya *stunting* pada anak masih ditemukan di wilayah Kelurahan Tanjung Mas, yaitu adanya masyarakat yang masih cenderung memandang sebelah mata upaya penanganan *stunting* dan banyaknya jumlah pernikahan dini (Sumber : wawancara kepada Kepala Sekbid Kesehatan Masyarakat Kota Semarang, Pegawai Penanganan Gizi Puskesmas Bandarharjo dan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Semarang, 2023)
- 3) Belum terdapat inovasi yang optimal untuk kolaborasi penanganan *stunting* yang dikaitkan dengan kebutuhan penuntasan permasalahan banyaknya kuantitas *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, yakni masih banyak kasus *stunting* akibat kondisi lingkungan masyarakat yang kurang mendukung, kondisi sanitasi dan kondisi ekonomi keluarga yang tidak baik sehingga upaya penanganan *stunting* perlu menitikberatkan pada efektivitasan program, solusi, dan pendanaan kepada pencegahan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas. Selain itu, belum terdapat penerapan untuk pendampingan ekonomi dan finansial bagi masyarakat Kelurahan

Tanjung Mas (Sumber : wawancara kepada kepala Kelurahan Tanjung Mas dan Kepala Sekbid Kesehatan Masyarakat Kota Semarang, perwakilan Akademisi Konsultan Gizi Online Departemen Ilmu Gizi Undip, 2023)

- 4) Kurangnya infrastruktur untuk menunjang pengentasan kasus *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas yang dibuktikan dengan kondisi Rumah Pelita di area Semarang Utara yang tidak memadai area Kelurahan Tanjung Mas, area sanitasi yang sangat buruk, ditambah dengan kondisi banjir rob di wilayah Kelurahan Tanjung Mas (wawancara kepada Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang (2023).
- 5) Partisipasi masyarakat ke posyandu masih sebesar 44% sehingga menyebabkan masih ada balita yang tidak dipantau tumbuh kembangnya secara rutin serta ibu atau pengasuh anak tidak mendapatkan penyuluhan mengenai pola asuh dan pola makan yang tepat bagi bayi dan balita

Berdasarkan uraian diatas disebutkan bahwa setiap pengukuran *stunting* yang terdapat di Kecamatan Semarang Utara selalu memiliki peringkat tertinggi untuk perhitungan kuantitas balita *stunting* selama tahun 2020-2022 meskipun bukanlah wilayah dengan jumlah balita terbanyak selama 3 tahun. Ditelisik, ternyata penyebabnya adalah jumlah balita *stunting* tertinggi dalam 3 tahun (2020-2022) berada di kelurahan Tanjung Mas. Permasalahan *stunting* merupakan hal yang kompleks berupa multi-dimensional untuk ditangani sehingga harus melibatkan keberperanan banyak aktor untuk koordinasi dalam menjalankan program di berbagai sektor. Ditemukan adanya kolaborasi *multi-stakeholders* di Kelurahan Tanjung Mas sebagai solusi untuk menangani *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, namun kolaborasi tersebut belum

berjalan secara optimal untuk mengatasi penyebab banyaknya jumlah *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas. Berdasarkan uraian data pada latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kolaborasi *multi-stakeholder* sebagai upaya penurunan angka *stunting* di kelurahan Tanjung Mas di Kota Semarang dengan Judul **“Collaborative Governance dalam Penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana model *collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat *collaborative governance* di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan identifikasi dari permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang. Tujuan penelitian mengikuti kerangka identifikasi sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan model *collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang
2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat *collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan data penelitian ini, maka manfaat yang akan diperoleh sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademik, khususnya dalam topik kolaborasi pemerintahan yang berkontribusi untuk karya tulis ilmiah tentang pengelolaan unit pelayanan terpadu

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan peneliti bagi seluruh pihak terkait dengan penelitian ini, antara lain :

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan serta pemahaman mengenai beberapa hal yang diperoleh di lapangan dan menerapkan ilmu tersebut di kehidupan dan lingkungan sekitar

2) Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberi masukan bagi instansi terkait dan dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk seluruh instansi baik dari pemerintah maupun swasta yang terlibat dalam penelitian skripsi dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang.”

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi ilmiah serta kontribusi wawasan pada pihak masyarakat terkait kolaborasi para pihak dalam penurunan tingkat *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan topik serta judul yang diangkat oleh penulis dalam tulisan ini, penulis mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu sehingga memperkaya teori serta bahan kajian dalam tulisan ini. Dari penelitian terdahulu, penulis belum menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian penulis. Berikut ini terdapat beberapa jurnal penelitian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 1.2

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penulis / Jurnal	Judul	Metode Penelitian dan Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Kurniasih, Y., Suwitri, S., & Hapsari, S. W. (2023) / <i>Journal of Public Administration and Local Governance</i> , 7(1), 68-76.	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Temanggung	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. <i>Middle</i> teori Ansell and gash (2007) dan Emerson, Nabagci dan Balogh (2011) yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. kondisi awal 2. desain kelembagaan 3. kepemimpinan fasilitatif 4. proses kolaborasi. 	Hasil sementara yang didapatkan terjadi penurunan angka stunting pada hasil penimbangan serentak pada bulan february 2022 yaitu sebanyak 2,9% dan komitmen antar anggota konvergensi.
2.	Trisniati, E., Cadith, J., & Nugroho, K. S. (2022). <i>Jurnal Governansi</i> , 8(1), 59-68.	<i>Collaborative Governance In Social Developing Zone</i>	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Peneliti menggunakan teori sintesis dari <i>Ansell & Gash</i> (2008), Islamy (2018), yang mengukur <i>Collaborative governance</i> berdasarkan empat Indikator berdasarkan sub indikatornya, yaitu:	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum berjalan optimal. Penelitian ini merekomendasikan bahwa masyarakat meningkatkan sumber daya yang dimilikinya agar dapat ikut berkolaborasi; pemerintah memberikan pelatihan berkelanjutan untuk membantu masyarakat agar aktif berkolaborasi dan membentuk forum khusus

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Awal (<i>Starting Conditions</i>) <ol style="list-style-type: none"> a) Ketidakseimbangan sumber daya, pengetahuan dan kekuatan b) Sejarah kerjasama dan konflik c) Dorongan dan kendala partisipasi kolaborasi 2. Desain Kelembagaan (<i>Institutional Design</i>) <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Inclusiveness Participatory</i> b) <i>Forum Exclusiveness</i> c) <i>Clear Ground Rules</i> d) <i>Process Transparency</i> 3. Kepemimpinan Fasilitatif (<i>Facilitative Leadership</i>) <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Facilitation</i> b) <i>Mediation</i> c) <i>Empowerment</i> 4. Proses Kolaboratif (<i>Collaborative Process</i>) <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Face to Face Dialogue</i> b) <i>Trust Building</i> c) <i>Commitment to Process</i> d) <i>Shared Understanding</i> e) <i>Intermediate Outcomes</i> 	<p>sebagai wadah untuk berkomunikasi dan berdiskusi terkait visi dan misi yang ingin dicapai bersama dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.</p>
--	--	--	--	--

3.	Martomo, Y. P., & Khairul, K. (2021) / <i>Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area</i>	Pengelolaan Pasar Klewer Pasca Kebakaran Berbasis <i>Collaborative Governance</i> (Perspektif <i>Civil Society</i>)	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk mengungkapkan realita dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan pengalamannya. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari teori (Emerson, K., Nabatchi, T., Balogh 2011), (Bourgon 2009), (Lacina 2011), (Barber,T., Lenihan, D., Milloy, J., Fox 2007), (Bovaird 2012), (Chris Ansell and Alison Gash 2007).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat pasar dalam kolaborasi tidak hanya mengandalkan dan bergantung pada pihak pemerintah dan pihak swasta. Masyarakat pasar juga berpartisipasi secara aktif terkait kelancaran operasional Pasar Klewer Dengan ikut menjaga dan memelihara kebersihan, keamanan, ketertiban, dan menyiapkan diri atau mengantisipasi jika terjadi kebakaran pasar terulang kembali.
4.	Fatimah, A. S. (2021) / <i>JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)</i> , 2(3).	<i>COLLABORATIVE GOVERNANCE</i> DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA TASEK MALAYA	Metode penelitian yang adalah metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Peneliti menggunakan teori Kolaborasi Model <i>Penta Helix</i> (Arif Yahya) : 1. Pebisnis 2. Pemerintah 3. Komunitas 4. Akademisi 5. Media	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Collaborative governance</i> dalam pengembangan usaha mikro di Kota Tasikmalaya Ini dilakukan dengan pendekatan <i>triple helix</i> yaitu kolaborasi antara pemerintah, swasta dan akademisi.

5.	Wibowo, A. N. F. A. (2020) / <i>Jurnal Ilmiah Indonesia</i> , 5(3), 1-18.	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Medan.	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teori Ansell dan Gash (2007), yakni indikator proses <i>collaborative governance</i> , yakni : <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Face to Face Dialogue</i> 2. <i>Trust Building</i> 3. <i>Commitment to Process</i> 4. <i>Shared Understanding</i> 5. <i>Intermediate outcome</i> 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap Trust building terjadi konflik internal BLU UPTD Trans Semarang, dimana sebagian pihak menolak melaksanakan kebijakan pimpinan. Sedangkan pada tahap <i>Share Understanding</i> Terjadi ketidaksesuaian antara keinginan operator dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BLU UPTD Trans Semarang. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kolaborasi dalam pelayanan transportasi publik ini adalah faktor budaya dan faktor institusi.
6.	Harakan, A., & Ferawaty, F. (2020) / <i>Journal of Public Administration Studies</i> , 3(1), 38-53.	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Menjalankan Sistem Keamanan Berbasis <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i> di Kota Makassar.	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teori Ansell dan Gash (2007), yakni indikator proses <i>collaborative governance</i> , yakni : <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Face to Face Dialogue</i> 2. <i>Trust Building</i> 3. <i>Commitment to Process</i> 4. <i>Shared Understanding</i> 5. <i>Intermediate outcome.</i> 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan <i>collaborative governance</i> antara Pemerintah Kecamatan Panakkukang, Dinas Kominfo Kota Makassar, Polrestabes Makassar. Adapun Faktor pendukung dalam proses <i>collaborative governance</i> ini adalah adanya peraturan walikota No. 4 Tahun 2017 Tentang Penyediaan dan Pemasangan CCTV Pada Bangunan Dan Gedung. Kemudian untuk faktor penghambat yaitu sumber daya manusia, keterbatasan dana dan kurang partisipasi swasta.
7.	Wijaya, C., & Sari, V. D. P. (2020) / <i>Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik</i> , 9(2), 225-236.	<i>Encouraging Collaborative Governance in Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)</i>	Penelitian ini menggunakan metode evaluasi kualitatif . Penelitian ini menggabungkan konsep <i>Collaborative Governance</i>	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Program 'BUMDes Bersama merupakan kerjasama antar lembaga ekonomi desa yang melibatkan beberapa BUMDes lintas desa. Pemerintah perlu mendorong kemitraan yang

		<i>Management Indonesia</i> in	dari (Bodin, 2017; Bodin et al., 2016; Emerson & Nabatchi, 2015), yaitu : pemerintahan sebagai proses kolektif dan egaliter, memiliki kesempatan dan otoritas substantif yang sama oleh setiap peserta dan dalam proses pengambilan keputusan.	lebih luas untuk memungkinkan pertukaran pengalaman dan memperluas skala usaha dan penetrasi pasar mereka yang melibatkan kerjasama dengan institusi publik dan institusi swasta.
8.	Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governance in an Effort to Traffic and Road Transportation Safety in Semarang City. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 8(3), 34-51.	<i>Collaborative Governance</i> dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang	Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori penelitian yang digunakan adalah tata kelola kolaboratif dari Ansell and Gash (2008), yakni : 1. kondisi awal 2. desain kelembagaan 3. kepemimpinan fasilitatif 4. proses kolaborasi	Hasil penelitian menunjukkan <i>collaborative governance</i> dalam implementasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Semarang dilihat dari kondisi awal, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif sudah berjalan dengan baik, namun implementasi fasilitatif kepemimpinan belum optimal. Faktor pendorong yang mempengaruhi kolaborasi yaitu struktur jaringan, komitmen pada tujuan bersama, akuntabilitas/tanggung jawab distributif, dan berbagi informasi, sedangkan satu-satunya faktor penghambat akses ke sumber daya.
9.	Candranegara , I. M. W., Mirta, I. W., & Suryana, I. N. M. (2019) / In Iapa Proceedings Conference (p p. 68-74).	<i>Government Collaboration Of Pentahelix Models In The Management Of Ecotourism D'Bendungan View Telaga Tunjung (Case Study Management of</i>	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teori Model Kolaborasi <i>Pentahelix</i> dari Arif Yahya : 1. Akademisi 2. Bisnis 3. Komunitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat desa setempat melalui Paiketan Krama Rantauan Timpag (PAKERTI) selaku pengelola D'Bendungan View dapat mengetahui dan dapat menggali potensi yang dimiliki khususnya terkait pengembangan ekowisata. Pemerintah Melalui Dinas Pariwisata Bekerjasama dengan pengelola

		<i>Ecotourism D'Bendungan View Telaga Tunjung in Timpag Village, Tabanan Bali)</i>	4. Pemerintah 5. Media	Bendungan View mampu membuat suatu sistem (manajemen) terkait pengelolaan Ekowisata.
10.	Ran, B., & Qi, H. (2018) / <i>The American Review of Public Administration</i> , 48(8), 836- 851.	<i>Contingencies of Power Sharing Collaborative Governance</i>	Penelitian ini menggunakan studi literatur. Penelitian ini mengkaji teori dari (Agranoff & McGuire, 1999; Huxham & Vangen, 1996; Mandell & Keast, 2007; O'Leary & Vij, 2012; Weber, 2008), yakni : 1. collaborative governance, 2. collaborative public management, 3. collaborative decision making, 4. network governance	Dalam artikel tersebut penulis mencoba untuk mengeksplorasi kemungkinan tertentu yang mempengaruhi hubungan antara pembagian kekuasaan dan efektivitas tata kelola kolaboratif.

Berdasarkan dengan beberapa data terkait penelitian terdahulu, keseluruhan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan rata-rata penggunaan pendekatan secara deskriptif. Pengambilan teori rata-rata bersumber dari model teori pendapat Ansel dan Gash (2008), yakni 1) Kondisi awal; 2) Desain kelembagaan; Kepemimpinan; Proses Kolaboratif yang terdiri dari: a) *Face to Face Dialogue* (Dialog Tatap Muka); b) *Trust Building* (Membangun Kepercayaan); c) *Commitment to Process* (Komitmen dalam Proses Kolaborasi); d) *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama); e) *Intermediate Outcome* (Hasil Antara). Model teori tersebut menjadi acuan penelitian penulis untuk rumusan permasalahan pertama.

1.5.2. Administrasi Publik

Berdasarkan pendapat Pasolong (2014), administrasi adalah sebuah upaya kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Syafiie (2010) mendefinisikan publik sebagai sejumlah manusia yang telah memiliki kesamaan pikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik sesuai dengan nilai dan norma yang dimiliki.

Administrasi publik berdasarkan pendapat *Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro* (dalam Syafiie, 2010) merupakan suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan yang meliputi ketiga cabang pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berperan penting dalam merumuskan kebijakan publik yang merupakan bagian dari proses politik. Administrasi publik sangat berkaitan dengan berbagai kelompok swasta maupun secara individual dalam pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan dengan runtutan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan sebuah upaya kerjasama yang dilakukan oleh lembaga

pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan agar tercipta pelayanan publik yang efisien dan efektif, dan dalam pelaksanaannya sangat berkaitan dengan berbagai kelompok swasta maupun secara individual dalam pelayanan kepada masyarakat.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry (dalam Keban, 2019) membagi Administrasi Negara ke dalam lima paradigma, yakni sebagai berikut :

1. Paradigma 1 (Dikotomi Politik Administrasi, 1900-1926)

Tokoh yang menginisiasi paradigma ini adalah *Frank J. Goodnow* dan *Leonard D. White*. Pendapat *Goodnow* adalah politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedangkan administrasi memusatkan pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Penekanan dalam paradigma ini adalah pada lokusnya saja, yakni birokrasi pemerintahan. Fokus atau metode yang harus dikembangkan dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci.

2. Paradigma 2 (Prinsip-Prinsip Administrasi, 1927-1937)

Tokoh-tokoh dalam paradigma ini adalah *Willoughby*, *Gullick & Urwick*, yang dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti *Henry Fayol* dan *F. W. Taylor*. Prinsip POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*) yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh tersebut disebut prinsip-prinsip administrasi dan menjadi fokus dari administrasi publik dalam paradigma ini. Sedangkan locus dari administrasi publik tidak

diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip administrasi bersifat universal atau dapat diterapkan dimana saja, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta.

3. Paradigma 3 (Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik, 1950-1970)

Pada paradigma ini, terjadi pertentangan mengenai hubungan konseptual antara administrasi negara dengan ilmu politik. Konsekuensi dari pertentangan tersebut adalah munculnya paradigma baru yang beranggapan bahwa administrasi publik sebagai ilmu politik, dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan.

4. Paradigma 4 (Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi, 1956-1970)

Pada paradigma keempat ini, pembahasan-pembahasan mengenai teori organisasi dan ilmu manajemen dikembangkan secara ilmiah dan lebih mendalam. Fokus dari paradigma ini sangat jelas, yaitu perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern. Namun, lokusnya menjadi tidak jelas karena semua fokus yang dikembangkan, diasumsikan dapat diimplementasikan dalam dunia bisnis maupun dunia administrasi publik.

5. Paradigma 5 (Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara, 1970-saat ini)

Paradigma kelima ini, fokus dan lokus administrasi telah jelas. Fokusnya adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah masalah dan kepentingan publik.

Ikeanyibe, dkk. (2017) menambahkan paradigma Administrasi Negara berikut:

6. Paradigma 6 (Governance, 1990-saat ini)

Konsep paradigma ini merupakan penerjemahan baru dan aplikasi dari akhir tahun 1980 - 1990. Menurut *Tamayan* (dalam Ikeanyibe, dkk., 2017), konsep ini dapat dikatakan sebagai praktik dari kekuasaan kesejahteraan warga negara, proses kompleks dimana beberapa sektor masyarakat memegang kekuasaan, dan memberlakukan serta mengumumkan kebijakan publik yang secara langsung mempengaruhi interaksi manusia dan kelembagaan, ekonomi, serta perkembangan sosial. Selain itu, *Stoker* (dalam Ikeanyibe, dkk., 2017) melanjutkan bahwa terdapat lima proporsi kritis dan dilematis yang kemudian menjadi prinsip paradigma ini, yaitu:

- 1) Jaringan institusi dan aktor dari dalam dan diluar pemerintah
- 2) Batas yang abu-abu dan tanggung jawab untuk menangani masalah sosial dan ekonomi
- 3) Ketergantungan kekuasaan di antara institusi yang terlibat dalam sksi kolektif
- 4) Jaringan aktor otonom yang mengatur diri sendiri
- 5) Kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bergantung pada kekuatan pemerintah untuk memerintahkan atau menggunakan wewenangnya.

Gibson (dalam Ikeanyibe, dkk., 2017) mengamati bahwa terdapat banyak bentuk dari paradigma *governance* yang di dokumentasikan dalam literatur

sebagai tata kelola. Setiap model mengusulkan penekanan yang berbeda, baik kurang atau lebih bergantung pada konteks lokal. Model *governance* dalam konsep tata kelola terdiri dari:

1. *Governance as Government* (Pemerintah sebagai Pemerintah)

Pada konteks ini berkaitan dengan penjelasan keberadaan dari masyarakat, pihak ketiga, dan keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan telah ada mulai dari administrasi publik pada era tradisional. Dalam pendekatan ini, pemerintah tetap menjadi pemegang inisiatif dalam hal mengintegrasikan aktor-aktor lainnya dalam mencapai tujuan pemerintahan.

2. *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)

Model ini menekankan pada pentingnya peran dari pemerintah untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan kepentingan publik melalui kepemimpinan yang efektif, visioner, berintegritas, transparansi, dan akuntabilitas.

3. *Governance as Good Enough Governance* (Pemerintahan sebagai tata kelola pemerintahan yang cukup baik)

Tata kelola yang cukup baik berkaitan dengan kontribusi intervensi dalam perkembangan politik dan ekonomi perlu dipertanyakan, diprioritaskan, dan relevan dengan kondisi negara tersebut. Pemerintahan sebagai tata kelola, pemerintahan yang cukup baik tidak membahas mengenai jalan pintas mengenai pembangunan,

pengembangan kebijakan, implementasi program, pemberian layanan ataupun isu-isu dalam *good governance*. Konsep ini hanya mengadvokasi pendekatan inkremental dalam prioritas untuk mengejar tata kelola pemerintahan yang baik mengingat adanya fakta keterbatasan sumber daya modal, waktu, pengetahuan, kapasitas manusia, dan organisasi.

4. *Collaborative, Partnership, Network Governance* (Kolaborasi, Kemitraan, dan Jaringan Pemerintahan)

Model baru dari pemerintahan ini menekankan pada fungsi jaringan, kemitraan, kolaborasi, serta banyak hal lain yang menggaris bawahi pemerintahan sebagai keterlibatan eksternal kapasitas manusia dan organisasi.

Dalam kaitannya dengan paradigma Administrasi Publik, penelitian ini mengacu pada paradigma ke- 6, yakni *Governance*, khususnya dengan model *Collaborative*. Penelitian ini menyoroti tentang kolaborasi para aktor dan perannya dalam upaya penurunan jumlah *stunting* di kelurahan Tanjung Mas. Pada paradigma ini menekankan pada salah satu prinsip, yakni jaringan institusi dan aktor dari dalam dan diluar pemerintah sehingga fungsi jaringan, kemitraan, kolaborasi, serta beberapa hal lain yang menggaris bawahi pemerintahan sebagai keterlibatan eksternal.

Terdapat dua konsentrasi dalam ilmu administrasi publik, yakni kebijakan publik dan manajemen publik. Kebijakan publik membahas mengenai

proses formulasi, implementasi, hingga evaluasi. Sedangkan manajemen publik berkaitan dengan penerapan fungsi - fungsi manajemen dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan konsentrasi Manajemen Publik.

1.5.4. Manajemen Publik

Menurut Overman (1984), manajemen publik merupakan sebuah penelitian interdisipliner dalam organisasi dan merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian fungsi manajemen. Manajemen publik merupakan cabang atau satu aspek dari bidang studi yang lebih luas yakni ilmu administrasi publik. Sebagai bagian dari administrasi publik, manajemen publik adalah ilmu dan seni yang berintikan metodologi terapan untuk merancang program program administrasi publik, restrukturisasi organisasi, kebijakan dan perencanaan manajerial, alokasi sumberdaya, sistem penganggaran, pengelolaan finansial, manajemen SDM, masalah audit serta evaluasi. Manajemen publik lebih luas mencakup manajemen lingkungan eksternal organisasi, sedangkan administrasi publik bekerja dalam konteks organisasi. Terdapat empat prinsip *fundamental* dalam manajemen publik berupa studi interdisipliner mencakup aspek politik, sosial, kultural yang memberikan perubahan pemerintah maupun diluar pemerintah.

Agronoff dan *McGuire* (dalam Kapucu, 2010) mendefinisikan manajemen publik secara kolaboratif adalah konsep yang menggambarkan proses pengoperasian yang memfasilitasi pengaturan multi-organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah oleh satu organisasi. *Shafritz* and *Russell* (dalam Keban, 2008) mendefinisikan manajemen sebagai upaya seseorang untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi dan pemanfaatan sumber daya dengan tujuan

mencapai tujuan organisasi. Terdapat 5 karakteristik utama dari manajemen publik menurut Minogue (2000), yaitu :

1. Berkaitan dengan tugas - tugas operasional pemerintahan daripada peran perumusan kebijakan
2. Berkonsentrasi pada upaya pencapaian tujuan daripada upaya berkuat dengan proses dan prosedur
3. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan daripada kebutuhan birokrasi
4. Jauh dari pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan peran utamanya memberikan arahan atau pemberdayaan kepada masyarakat
5. Mengubah diri dari dari budaya birokrasi

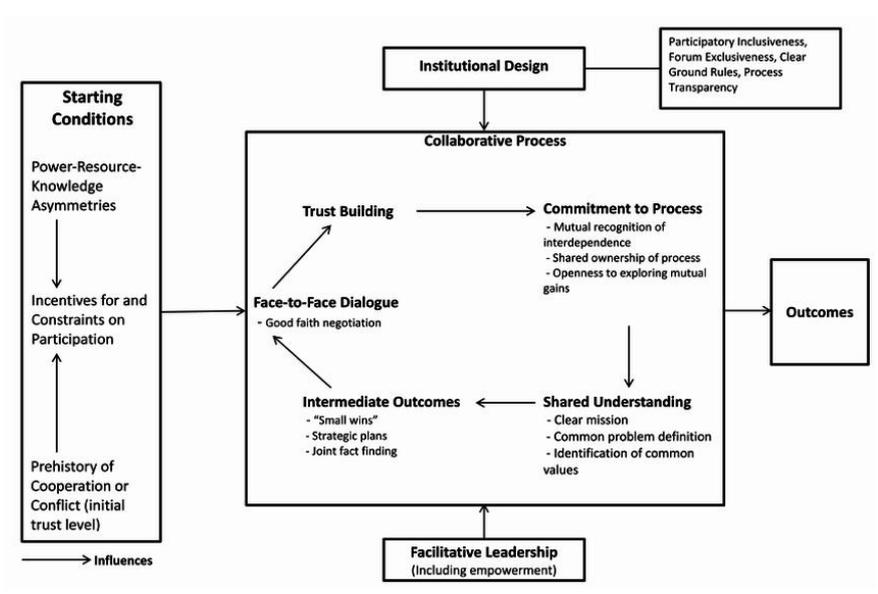
1.5.5. Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-Negara Dalam proses pengambilan keputusan bersama yang sifatnya musyawarah di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset (Ansell dan Gash, 2008).

O'Leary dan *Bingham* (dalam Sudarmo, 2015) berpendapat bahwa kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. *Edward DeSeve*

(Sudarmo, 2015) mendefinisikan *collaborative governance* adalah sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batas batas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan definisi kesuksesan yang jelas.

Dari pendapat ini disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* dapat dikatakan sebagai konsep tata kelola kolaboratif yang menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau, masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.



Gambar 1.5 Model Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash (2008)

Sumber : Ansell, C., & Gash, A. (2008).

Adapun model *collaborative governance* yang dijadikan referensi pada penelitian menurut Ansell dan Gash (dalam Hardi, 2018) yang menggunakan empat dimensi *collaborative governance* beserta indikator pengukuran sebagai sub fenomena, berikut digambarkan dalam 4 (empat) variabel utama yang terdiri dari :

1. Kondisi Awal

Kondisi di awal terjadi atau sebelum kolaborasi, terdapat kondisi dimana dapat menjadi pendukung ataupun penghambat kerja sama antara pemangku kepentingan, dan antara lembaga/ organisasi dengan pemangku kepentingan. Terdapat 3 variabel kondisi diawal ini antara lain: ketidakseimbangan antara pengaruh/ kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan; sejarah di masa lalu yang terjadi baik berupa kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi diantara pemangku kepentingan; dan bentuk dorongan dan kendala dalam kolaborasi.

2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam berkolaborasi sangat mungkin ditemukan adanya konflik dan adanya ketidakpercayaan antara pemangku kepentingan, namun disisi lain terdapat keinginan yang besar dari para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi, maka disinilah dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator serta memfasilitasi tim dalam stakeholder untuk melaksanakan tanggung jawab dalam pengaturan pada kolaborasi.

4. Proses Kolaboratif

Suatu kolaborasi memerlukan tahapan bagi beberapa pihak yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pada implementasinya, proses kolaborasi merupakan sebuah siklus yang berulang-ulang dari interaksi antar pihak yang melakukan kolaborasi demi mencapai inti dari kolaborasi. Dalam prosesnya, kolaborasi memerlukan komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman, dan hasil.

1.5.6. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Collaborative Governance

Studi collaborative governance sangat relevan untuk digunakan dengan istilah kolaborasi yang menarasikan hubungan kerjasama oleh berbagai pihak. Konsep collaborative governance bermanfaat untuk mengidentifikasi masalah pemerintahan dan menemukan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan di pemerintahan. Penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan mengidentifikasikan beberapa hal yang menjadi fokus signifikan dalam perbaikan. Faktor pendukung dan penghambat merupakan dua hal yang dapat menjadi tolak ukur dalam menilai efektivitas suatu

kolaborasi. Dalam implementasi kolaborasi terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang ikut mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu kolaborasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2021), terdapat 3 faktor yang dapat diidentifikasi sebagai indikator untuk faktor pendukung dan faktor penghambat pada *collaborative governance* sesuai dengan pendapat-pendapat dari ahli sebagai berikut :

1. Faktor Struktur Sosial

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jalannya *collaborative governance* adalah struktur sosial. Sesuai dengan pendapat *Campbell* (dalam Septiani, 2021) bahwa di antara orang-orang (jaringan sosial mereka) dan norma timbal balik, serta kepercayaan yang muncul dari mereka. Struktur sosial memiliki komponen masyarakat yang merupakan sistem sosial, terdiri yaitu: keluarga, ekonomi, pemerintah, agama, pendidikan, dan lapisan sosial yang terkait satu sama lainnya, bekerja secara bersama-sama, saling berinteraksi, berelasi, dan saling ketergantungan (Jabrohim (dalam Rafiq, 2020).

Terdapat persamaan arti dari pendapat *Gilchrist and Kyprianou* (dalam Ulimaz, 2019) bahwa jaringan sosial terdiri dari hubungan keluarga, persahabatan, kekerabatan, komunitas kerja, dan komunitas informal. Lebih lanjut, Pendapat *Gilchrist and Kyprianou* (dalam Ulimaz, 2019) diambil arti bahwa dalam jaringan sosial tertentu terdapat sebuah kelompok yang memahami bagaimana modal sosial dapat dijalankan dan dimobilisasi sehingga setiap individu mampu untuk

mengakses informasi, pemahaman, dan kepentingan yang telah terkumpul secara kolektif.

2. Faktor Kultural

Sumber daya manusia termasuk salah satu faktor yang berkaitan erat dengan faktor kultural meliputi kemampuan budaya kerja masyarakatnya. *Kaner* (dalam Septiani, 2021) bahwa pelaksana, pemimpin dan fasilitator harus mencontohkan komitmen untuk belajar dan mengadopsi keterampilan kolaboratif seperti mendengarkan aktif, memastikan bahwa semua peserta didengarkan dan diperlakukan secara adil, mengidentifikasi dan menguji asumsi, berperilaku dan berkomunikasi secara otentik dan sabar menggerakkan kelompok. Diartikan dalam pendapat *McCarthy* (dalam Wright, 2006) pada *A culture of Collaboration*, bahwa efektivitas dalam dialog masyarakat akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat yang harus terjadi dalam budaya kolaborasi karena harapan terbaik dalam menyelesaikan konflik dengan hasil yang bermanfaat bagi seluruh pihak adalah melalui proses dialog yang efektif. Beberapa kebutuhan lainnya yang bersifat fundamental dalam budaya kolaborasi adalah kebutuhan transparansi, pengungkapan secara penuh, dan informasi yang relevan dalam dialog (komunikasi).

Berdasarkan pendapat faktor budaya dari *Government of Canada* (dalam Hardi, 2020) diambil maksud bahwa partisipasi dari kelompok kepentingan atau pemangku kepentingan harus dipandang menjadi hal utama dan sangat diperlukan agar tidak terjadi kegagalan dalam kolaborasi. Pendekatan yang dilakukan dalam

kolaborasi tidak harus *top-down*, namun dapat *bottom-up* sehingga tidak hanya di dominasi oleh pihak pemerintah.

3. Faktor Kepentingan Pemerintah

Faktor politik kepentingan diantara para pemangku kepentingan termasuk dalam faktor kepentingan pemerintah. Sudarmo (dalam Septiani, 2021) dijelaskan bahwa perubahan kesepakatan yang telah disetujui diawal kesepakatan kerjasama akibat adanya kepentingan baru yang berbeda-beda dari masing-masing pemangku kepentingan dapat menghambat proses kolaborasi tersebut sehingga harus terdapat konsistensi dari kesepakatan. Kepentingan pembuatan kebijakan dari kepentingan pemerintah harus selaras dengan kepentingan politik antar para pemangku kepentingan yang dapat diperoleh dengan adanya desentralisasi untuk akses terhadap kekuasaan kepada para pemangku kepentingan dalam kolaborasi.

Pendapat lainnya dari *Government of Canada* (dalam Hardi, 2020) yang termasuk dalam faktor politik diartikan bahwa terdapat kebutuhan dari para pemimpin kolaborasi untuk terus melakukan inovasi dalam pencapaian tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif untuk menghindari kegagalan kolaborasi. Lebih lanjutnya, kepemimpinan dalam kolaborasi sangat diperlukan untuk pemberian inspirasi dalam agenda yang harus mengarah ke pencapaian yang positif.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. *Collaborative Governance* dalam Upaya Penanganan Stunting di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang

Collaborative governance dalam penanganan stunting di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang adalah sebuah pengaturan kolaborasi pemerintahan berupa multi-aktor, baik organisasi maupun lembaga dengan tujuan menyelesaikan penyebab terjadinya *stunting* hingga mengurangi, serta mengentaskan jumlah balita stunting di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang. Analisis Model *Collaborative governance* menggunakan teori *Ansell and Gash* (2008) yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kondisi awal

Kondisi awal digunakan sebagai pengamatan kondisi sebelum terjadinya kolaborasi maupun kolaborasi sebelumnya. Untuk mengetahui kondisi awal *collaborative governance* dalam upaya penanganan *stunting* Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang, adapun indikator fenomena yang diamati sebagai berikut:

1. Sejarah Kerjasama dan Konflik
2. Ketidakseimbangan Kekuatan, Sumber Daya, dan Pengetahuan
3. Dorongan dan Kendala Partisipasi Kolaborasi

2. Desain Kelembagaan

Merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi sebagai sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Untuk mengetahui

desain kelembagaan *collaborative governance* dalam upaya penanganan stunting Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang, adapun indikator fenomena yang diamati sebagai berikut:

1. Kejelasan Aturan Dasar
 2. Inklusivitas Partisipan
 3. Eksklusivitas Forum
 4. Transparansi Proses Kolaborasi
3. Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam berkolaborasi dimungkinkan terjadinya konflik serta ketidakpercayaan antar pemangku kepentingan sehingga dibutuhkan pemimpin yang dapat diandalkan sebagai mediator, mampu memfasilitasi para *stakeholder* yang tergabung, serta menggerakkan timnya untuk berkomitmen dalam mencapai tujuan kolaborasi . Untuk mengetahui kepemimpinan *collaborative governance* dalam upaya penanganan *stunting* Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang, adapun indikator fenomena yang diamati sebagai berikut:

1. Fasilitasi
 2. Mediasi
 3. Pemberdayaan
4. Proses kolaboratif

Suatu kolaborasi memerlukan tahapan bagi beberapa pihak yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam prosesnya, kolaborasi memerlukan komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman, dan hasil. Pada implementasinya, proses kolaborasi merupakan sebuah siklus yang berulang-ulang dari interaksi antar pihak yang melakukan kolaborasi demi mencapai inti dari kolaborasi. Tahapan proses kolaborasi sulit ditentukan karena substansi pelaksanaannya yang berbeda, namun dapat diidentifikasi sebagai indikator fenomena sebagai berikut :

1. Dialog tatap muka
2. Membangun kepercayaan
3. Komitmen dalam Proses Kolaborasi
4. Pemahaman bersama
5. Hasil antara (pertengahan)

1.6.2. Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance* dalam Upaya Penanganan Stunting di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang

Faktor pendukung dan faktor penghambat *Collaborative governance* dalam upaya penanganan stunting di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang

Faktor pendukung dan penghambat *collaborative governance* dalam upaya penanganan stunting di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang diteliti menggunakan pengukuran berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2021), bahwa terdapat 3 faktor yang dapat diidentifikasi sebagai indikator untuk faktor pendukung dan

faktor penghambat pada *collaborative governance* sesuai dengan pendapat-pendapat dari ahli :

1. Faktor Struktur Sosial

Pada faktor struktur sosial melingkupi hubungan antar para pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi. Struktur sosial dapat berkaitan tentang perencanaan, struktur tugas, dan fungsi dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Adapun indikator fenomena yang diamati , yaitu (1) Struktur Jaringan; (2) Komitmen

2. Faktor Budaya

Faktor budaya berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari budaya kerjanya. Komunikasi dan partisipasi turut menjadi pengukuran pada faktor kultural. Adapun indikator fenomena yang diamati sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

2. Komunikasi Kolaborasi

3. Partisipasi

5. Faktor Kepentingan Pemerintah

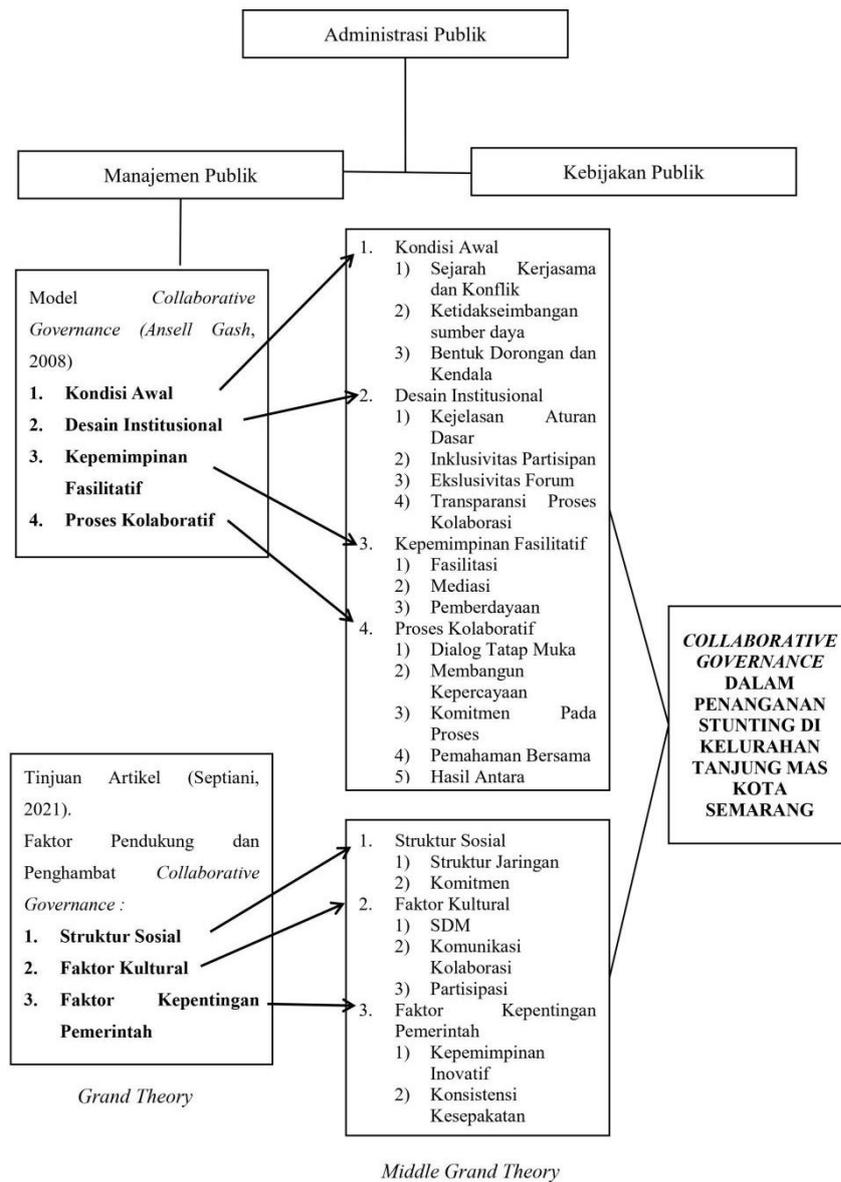
Akses kepemimpinan harus diperoleh oleh para pemangku kepentingan yang melakukan kolaborasi, disamping dengan kepentingan pemerintah dalam pengaturan regulasi kebijakan karena mempengaruhi keberlangsungan politik kolaborasi. Adapun indikator fenomena yang diamati sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Inovatif

2. Konsistensi Kesepakatan

1.6.3. Kerangka Pikir

Secara sistematis, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.6 Kerangka Pikir

Sumber : Ansell dan Gash (2008), Septiani (2021)

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini diambil atas dasar penelitian untuk pemenuhan pencapaian poin kedua pada 17 target global *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berjudul “*No Hunger*”. Permasalahan yang ditinjau dari pencapaian target SDGs *No Hunger* adalah implementasi dari turunan target *No Hunger*, yakni program SDGs *Zero Hunger* (2015-2030). Salah satu target *Zero Hunger* (2015-2030) menekankan pengentasan seluruh bentuk malnutrisi. Bentuk malnutrisi yang dapat dinyatakan merusak kualitas generasi mendatang adalah anak-anak yang terkena *stunting*. Permasalahan utama *stunting* menggambarkan terhambatnya perkembangan sel-sel otak anak. Kondisi tersebut menyebabkan anak yang mengalami *stunting* mempunyai kemampuan otak lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak terkena *stunting*. Secara cepat ataupun lambat, wilayah yang memiliki tingkat *stunting* yang banyak akan berefek pada sumber daya manusianya yang berkualitas rendah.

Permasalahan *stunting* di Indonesia merupakan hal yang sedang berusaha ditekan pemerintah demi perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian nutrisi anak sejak berada dalam kandungan hingga masa balita sebagai perbaikan gizi anak secara maksimal. Kemenko-PMK (2022) menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 115 dari 151 negara dengan angka, prevalensi kekerdilan pada anak *Stunting* tertinggi secara global. Upaya penurunan tingkat *stunting* dirasa belum efektif apabila hanya menggunakan skala persentase atau prevalensi dari jumlah balita dengan jumlah balita yang terkena *stunting* apabila dihitung dalam suatu kawasan terkecil. Hal ini dikarenakan prevalensi tidak menampilkan angka konkrit yang

bertujuan untuk identifikasi kondisi yang lebih jelas untuk menentukan upaya dari suatu permasalahan yang terdapat pada suatu wilayah.

Berikut adalah data prevalensi stunting per kecamatan di Kota Semarang selama 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2020-2022:

Tabel 1.3
Prevalensi Stunting Per Kecamatan di Kota Semarang (2020-2022)

	Semarang Tengah	Semarang Utara	Semarang Timur	Semarang Selatan	Semarang Barat	Gayamsari	Candisari	Gajahmungkur	Genuk	Pedurungan	Tembalang	Banyumanik	Gunungpati	Mijen	Ngaliyan	Tugu
2022	3,80	3,64	3,33	3,85	1,93	1,09	0,94	2,04	0,60	1,29	0,67	1,45	1,77	1,67	1,57	2,19
2021	7,26	6,30	3,98	6,52	3,07	0,37	1,41	4,18	1,65	1,37	2,31	1,87	2,55	2,07	4,18	1,68
2020	3,39	8,75	6,12	6,72	2,77	1,12	2,08	3,85	1,36	2,78	2,14	3,94	3,93	2,14	1,06	2,55

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023, diolah

Interpretasi data Dinkes Kota Semarang (2023) yang diolah menjelaskan bahwa prevalensi per kecamatan di Kota Semarang selama 3 tahun (2020-2022) selalu menunjukkan peringkat prevalensi tertinggi yang berbeda. Pada tahun 2020, kecamatan Semarang Utara dengan prevalensi 8,75%; pada tahun 2021, kecamatan Semarang Tengah dengan prevalensi 7,26%; dan pada tahun 2022, kecamatan Semarang Selatan dengan prevalensi 3,85%. Berdasarkan tingkat prevalensi dikatakan aman karena dalam setiap tahunnya terjadi perbedaan interval kasus tertingginya sehingga tidak dapat menjadi suatu permasalahan. Perbedaan penafsiran menurut kasus atau jumlah *stunting* per kecamatan di Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 1.4

**Kasus *Stunting* Per Kecamatan di Kota Semarang Kurun Waktu 3 Tahun
(2020-2022)**

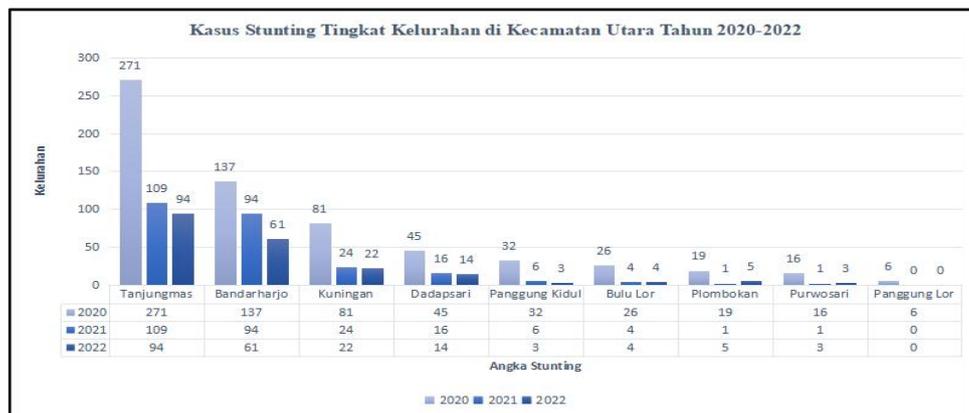
Kecamatan	2020		2021		2022	
	Stunting	Jumlah Balita	Stunting	Jumlah Balita	Stunting	Jumlah Balita
Semarang Tengah	87	2564	118	1625	73	1923
Semarang Utara	633	7232	255	4048	206	5654
Semarang Timur	217	3545	100	2510	93	2793
Semarang Selatan	183	2725	130	1994	93	2416
Semarang Barat	216	7793	128	4169	131	6784
Gayamsari	43	3836	7	1885	39	3569
Candisari	95	4561	33	2333	34	3623
Gajahmungkur	89	2310	58	1388	41	2014
Genuk	120	8819	59	3583	50	8327
Pedurungan	314	11296	43	3148	112	8692
Tembalang	280	13090	66	2860	73	10911
Banyumanik	330	8384	90	4814	101	6954
Gunungpati	250	6356	69	2701	111	6288
Mijen	120	5620	61	2952	84	5025
Ngaliyan	106	9962	137	3274	132	8391
Tugu	60	2353	13	774	43	1967
Total	3143		1367		1416	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023, diolah

Interpretasi data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Semarang (2023) menyebutkan bahwa permasalahan yang muncul karena adanya tingginya kesenjangan, yakni tingginya jumlah balita *stunting* selama 3 tahun berturut-turut di Kecamatan Semarang Utara, meskipun Kecamatan Semarang Utara tidak merupakan kecamatan dengan angka kelahiran tertinggi. Angka kelahiran tertinggi pada tahun 2020 berada di Kecamatan Tembalang sejumlah 13.090; tahun 2021 berada di Kecamatan Semarang Barat sejumlah 4.169; kemudian tahun 2022 berada di Kecamatan Tembalang sejumlah 10.911. Selain itu, terdapat *gap* kesenjangan yang dapat dikerucutkan kembali mengenai permasalahan balita *stunting* yang terdapat di Kecamatan Utara berdasarkan dengan kuantitas *stunting* per kelurahannya sebagai berikut :

Grafik 5

Kasus Stunting Tingkat Kelurahan di Kecamatan Semarang Utara (2020-2022)



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang (2023), diolah

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang (2023), jumlah *stunting* per kelurahan yang terdapat di Semarang Utara selama 3 tahun terakhir (2020-2022),

jumlah *stunting* pada kelurahan Tanjung Mas masih lebih tinggi dibanding dengan kelurahan lainnya, meskipun telah terdapat penurunan.

Penanganan *stunting* pada Kota Semarang yang dikhususkan untuk Kelurahan Tanjung Mas disebut *Pilot Project*. *Pilot Project* sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala kelurahan Tanjung Mas tersebut juga termasuk dari program Si Bening yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan pihak swasta, media, akademisi, serta masyarakat yang berdaya. Dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan pada kolaborasi pengentasan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas yaitu permasalahan, yaitu:

1. Program pelaksanaan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas belum optimal diantaranya PMT, Dapur Sehat, dan pendampingan oleh TPK karena keterbatasan dana
2. Koordinasi kolaborasi dari perusahaan, akademisi, media serta partisipasi masyarakat yang kurang maksimal karena rendahnya kesadaran masyarakat.
3. Belum terdapat inovasi yang optimal untuk kolaborasi penanganan *stunting* yang dikaitkan dengan kebutuhan penuntasan permasalahan banyaknya kuantitas *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas seperti kemiskinan dan tingginya angka pernikahan anak.
4. Adanya ketidakakuratan data posyandu akibat tercatatnya partisipasi masyarakat sebesar 44% di Kota Semarang.
5. Kurangnya infrastruktur untuk pengentasan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas. dibuktikan dengan kondisi rumah pelita Kecamatan Semarang utara yang tidak memadai dengan sanitasi yang buruk

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan tujuan menganalisis peristiwa yang terjadi menggunakan berbagai metode yang telah ada (Moleong, 2010). Berdasarkan tingkat eksplanasi, penelitian ini termasuk jenis sifat penelitian deskriptif. Maka dari itu, peneliti akan mendeskripsikan penelitian ini secara menyeluruh dengan analisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, dan pemikiran dari individu maupun kelompok baik yang diperoleh dari data observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

1.8.2. Situs Penelitian

Lokus penelitian berkaitan dengan wilayah lokasi penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan nama hierarki wilayahnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki lokus Kota Semarang. Situs penelitian berkaitan dengan domain spesifik penelitian. Situs penelitian yang penulis pilih terbagi menjadi beberapa domain sesuai dengan peran beberapa informan sebagai informan pada penelitian. Situs penelitian ini berada Kelurahan Tanjung Mas.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam hal ini adalah individu atau kelompok yang diharapkan penulis dapat menceritakan apa yang diketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau yang disebut dengan informan. Dalam memilih subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu apabila data yang

belum didapatkan belum lengkap dari beberapa informan yang sebelumnya telah ditetapkan, maka penelitian masih akan berlanjut dengan melibatkan informan-informan baru.

1.8.4. Jenis Data

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk kajian yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial (Polit dan Beck, 2009) yang bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti. Metode penelitian kualitatif biasanya mencakup wawancara dan observasi, tetapi mungkin juga termasuk studi kasus, survei, analisis historis dan dokumen.

1.8.5. Sumber Data

Lofland (dalam Moleong, 2010) mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber tertulis, kata-kata dan tindakan, foto, dan data statistik.

Pada penulisan tentang Kolaborasi Akselerasi Penurunan Tingkat *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas menggunakan sumber data :

1. Data Primer, merupakan data yang berasal dari sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data yang termasuk dalam data

primer misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung yang dilakukan peneliti kepada informan.

2. Data Sekunder, merupakan data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Data yang termasuk dalam data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, misalnya dari media massa (surat kabar ataupun internet), studi pustaka, artikel, ataupun media lain yang dapat mendukung penelitian.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk pembahasan dan pemecahan suatu permasalahan. Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Observasi

Esterberg (dalam Sugiyono, 2014) mendeskripsikan bahwa Wawancara adalah bentuk pertukaran informasi antara dua orang melalui tanya jawab, sehingga dapat diketahui makna dari suatu topik tertentu.

2. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono, 2014) mendeskripsikan bahwa wawancara adalah bentuk pertukaran informasi antara dua orang melalui tanya jawab, sehingga dapat diketahui makna dari suatu topik tertentu.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan mengkaji dan membuat catatan dari buku yang dijadikan rujukan seperti literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Sugiyono (2014: 246) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsungnya analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing verification*. Berikut adalah penjelasannya:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan dicatat secara rinci dan teliti. Banyaknya data yang diperoleh peneliti sejalan dengan lama waktu yang telah digunakan selama penelitian di lapangan. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Hal tersebut dapat memunculkan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *Sowcharr*, dan sejenisnya. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014) menyatakan bahwa

bentuk yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Hal tersebut akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. *Conclusion Drawing Verification*

Hasil dari penarikan kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Sebaliknya, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal sudah disertai dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dikatakan sebagai kesimpulan yang kredibel..

1.8.8. Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Standar kredibilitas dalam penelitian kualitatif harus diterapkan untuk memberikan penguatan kepada hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Pengujian kredibilitas data dapat digunakan menggunakan teknik pengumpulan data dengan triangulasi. Sugiyono (2014: 241) menyatakan bahwa triangulasi adalah penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.